



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT KABINET

**SEKRETARIAT KABINET
2022**



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT KABINET

**SEKRETARIAT KABINET
2022**



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

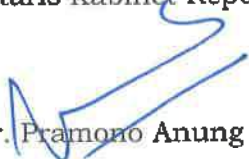
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 31 Januari 2022
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

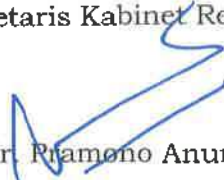
Dr. Ir.  Pramono Anung Wibowo, M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT KABINET

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	93 Persen
		Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	93 Persen
3	Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	92 Persen
		Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	100 Persen
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase tingkat kepuasan K/L (instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	94 Persen
		Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	90 Persen
		Indeks Reformasi Birokrasi	A (81,50)
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	WTP
		Persentase tingkat kepuasan penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet	92 Persen

	Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Rp37.451.201.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp288.864.730.000,-
	Total Anggaran	Rp326.315.931.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022
 Sekretaris Kabinet Republik Indonesia


 Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Wakil Sekretaris Kabinet

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Pertama,
Wakil Sekretaris Kabinet


Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
WAKIL SEKRETARIS KABINET**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Internal di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti	100 Persen
		Persentase Arahan Wakil Sekretaris Kabinet pada Surat atas Pelaksanaan Tugas Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti	100 Persen
		Persentase Rekomendasi Kebijakan terkait Masalah-masalah Strategis Berdasarkan Penugasan dan Arahan Sekretaris Kabinet dan/atau Inisiatif Wakil Sekretaris Kabinet yang dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase Arahan Wakil Sekretaris Kabinet pada Memorandum atas Pelaksanaan Tugas Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti	100 Persen

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Pertama,
Wakil Sekretaris Kabinet

Fadlansyah

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

**KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN**



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Deputy Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	93 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Hasil Penilaian SAKIP Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	A(80,00)
		Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan hasil reviu Inspektorat	34,00
		Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	90 Persen

	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp2.546.041.000,-
2.	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp1.253.959.000,-
3.	Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp200.000.000,-

Total Anggaran

Rp4.000.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,

Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,

Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri

Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan pemerintah/kepala lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan presiden di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pemerintahan dalam negeri	persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas kebijakan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Rp545.300.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
1. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Rp354.700.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,


Purnomo Susipto, S.H., LL.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri


Kardwiyana Ukur, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Poerwono, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,

Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara

Bambang Poerwono, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA

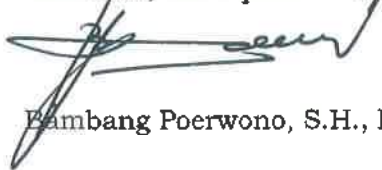
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/kepala lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp417.972.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
1. penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp482.028.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,


Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, dan Aparatur Negara


Bambang Poerwono, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.
Jabatan : Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

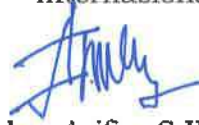
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,


Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Hubungan
Internasional


Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang hubungan internasional	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang hubungan internasional	Rp582.769.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
1. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional	Rp317.231.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,



Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional



Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,

Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M.,
M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	92 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	70 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	92 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	B (5-8 kali revisi)
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Rp1.000.000.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Rp100.000.000,-

Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Pernerjemah

1. Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Rp48.093.000,-
2. Penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Rp75.241.000,-
3. Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Rp76.666.000,-

Total Anggaran

Rp1.300.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan,


Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika


Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M.,
M.H.

KEDEPUTIAN BIDANG PEREKONOMIAN



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Jabatan : Deputy Bidang Perekonomian

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Deputy Bidang Perekonomian

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perekonomian	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang dimanfaatkan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perekonomian	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	93 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	Hasil Penilaian SAKIP Kedeputan Bidang Perekonomian	A(80,47)
		Nilai Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputan Bidang Perekonomian setelah reuiu Inspektorat	35.13
		Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputan Bidang Perekonomian	90 Persen

	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	Rp1.814.287.000,-
2.	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	Rp1.985.713.000,-
3.	Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp200.000.000,-
	Total Anggaran	Rp4.000.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet



Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Perencanaan Pembangunan, dan
Pengembangan Iklim Usaha

Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG EKONOMI MAKRO, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN
PENGEMBANGAN IKLIM USAHA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretariat Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di di Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	B (5-8 kali revisi)

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	
Rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro,	
1. Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Rp397.284.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	
Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di	
1. bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha	Rp502.716.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Perencanaan Pembangunan, dan
Pengembangan Iklim Usaha



Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Kurniawan, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Agus Kurniawan, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN
KETENAGAKERJAAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang di setujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Perdagangan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Rp492.760.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Rp407.240.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan



Agus Kurniawan, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha
dan Wilayah

Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN WILAYAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai dengan ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai dengan ketentuan	93 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rp520.262.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah	Rp379.738.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah



Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan
Pangan, Riset, dan Teknologi

Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	92 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Perekonomian	70 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disampaikan secara tepat waktu	92 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	B (8 kali revisi)
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	90 Persen

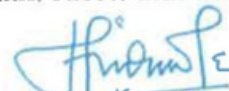
Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	
1. Rekomendasi kebijakan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	Rp403.981.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	
1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi	Rp696.019.000,-
Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Pernerjemah	
1. Penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputian Bidang Perekonomian	Rp90.076.000,-
Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan	
2. penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	Rp35.900.000,-
3. Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Perekonomian	Rp74.024.000,-
Total Anggaran	Rp1.300.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian



Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi



Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.

**KEDEPUTIAN BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN**



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

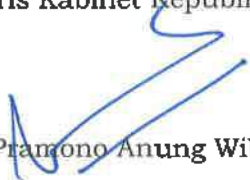
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimanfaatkan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti	93 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Hasil Penilaian SAKIP Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	A (80,47)
		Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan hasil revidi Inspektorat	35,13
		Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	90 Persen

	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp2.104.894.000,-
2.	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp1.695.106.000,-
3.	Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp200.000.000,-
	Total Anggaran	Rp4.000.000.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan


Dr. Ir. Prantono Anung Wibowo, M.M.


Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,
Pemuda, dan Olahraga

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	C (9-12 Kali Revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Rp698.702.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan	
1. pemerintahan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Rp201.298.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan


Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,
Pemuda, dan Olahraga


Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

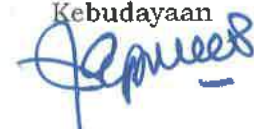
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan


Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan


Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	C (9-12 Kali Revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Rp441.834.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
1. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Rp458.166.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan


Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan


Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL
Jabatan : Asisten Deputy Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Sosial, Kebencanaan,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak


Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.


Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perekonomian di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	C (9-12 Kali Revisi)

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Sosial,	
1. Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp577.602.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan	
1. pemerintahan di bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp322.398.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.	Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak  Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL
---	--



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asri Ernawati, S.H., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
---	--


Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.


Asri Ernawati, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	92 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	70 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	92 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	C (12 Kali Revisi)
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	C (9-12 Kali Revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rp386.756.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rp713.244.000,-

Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah

1. Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp118.212.000,-
2. Penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp48.806.000,-
3. Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Rp32.982.000,-

Total Anggaran

Rp1.300.000.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi


Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.


Asri Ernawati, S.H., M.H.

KEDEPUTIAN BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.
Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang dimanfaatkan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	93 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi	Hasil penilaian SAKIP Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi	A (80,47)
		Indeks komponen pengungkit Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi hasil reviu Inspektorat	34,26
		Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi	90 Persen

	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp2.070.933.000,-
2.	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp1.729.067.000,-
3.	Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp200.000.000,-
	Total Anggaran	Rp4.000.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia


Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi


Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Irawati, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

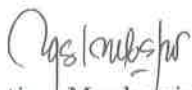
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Kelautan, Perikanan,
dan Kehutanan


Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.


Diana Irawati, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan dan kehutanan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kelautan, perikanan dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kelautan, perikanan dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kelautan, perikanan dan kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	Rp542.699.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi	
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan	
1. pemerintahan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	Rp357.301.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi


Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan,
dan Kehutanan


Diana Irawati, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Troeno Marayoga, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral
dan Lingkungan Hidup

Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Troeno Marayoga, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

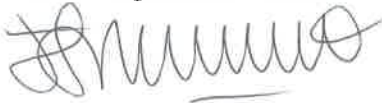
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp487.000.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Rp413.000.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi


Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup


Troeno Marayoga, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hennie Ambar Susilowati, S.H.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jabatan : Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi


Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Perhubungan dan
Pekerjaan Umum

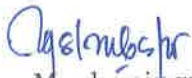

Hennie Ambar Susilowati, S.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp462.155.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum	Rp437.845.000,-
Total Anggaran	Rp900.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi


Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum


Hennie Ambar Susilowati, S.H.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal
dan Kepariwisata


Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.


Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANAMAN MODAL DAN KEPARIWISATAAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanaman modal dan kepariwisataan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi	Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu	92 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi	70 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu	92 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	B (5-8 kali revisi)
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan	Rp579.079.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi	
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan	Rp520.921.000,-
Penyelenggaraan layanan Fasilitas Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	
1. Penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp141.262.000,-
2. Fasilitas terkait Pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp30.600.000,-
3. Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp28.138.000,-
Total Anggaran	Rp1.300.000.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal
dan Kepariwisata


Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.


Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

KEDEPUTIAN BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

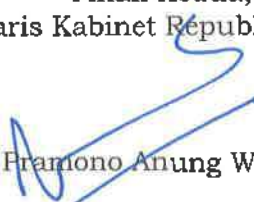
Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	92 Persen
		Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	92 Persen
		Persentase naskah kepresidenan yang disampaikan dan disetujui Presiden RI	100 Persen
		Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari stakeholder	100 Persen
2	Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet	Persentase tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan melalui website dan media sosial	92 Persen
		Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan	92 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Hasil Penilaian SAKIP Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet	A (80,63)
		Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet setelah reviu Inspektorat	34,96
		Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	90 Persen

	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyiapan Naskah Kepresidenan dan Penerjemahan	Rp1.000.000.000,-
2.	Penyelenggaraan dan pelaporan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp6.600.000.000,-
3.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik serta Keprotokolan	Rp2.800.000.000,-
4.	Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp200.000.000,-
	Total Anggaran	Rp10.600.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir.  Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet


Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan
Persidangan

Dr. Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum.,
LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya persidangan kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet	92 Persen
		Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet	92 Persen
		Persentase layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya sesuai ketentuan	100 Persen
2	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyelenggaraan dan pelaporan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

1. Layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya

Rp4.500.000.000,-

Total Anggaran

Rp4.500.000.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan
Persidangan



Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.



Dr. Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum.,
LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Priyantono, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pelaporan
Persidangan

Heru Priyantono, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG PELAPORAN PERSIDANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengelolaan hasil sidang yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan permohonan salinan risalah Sidang Kabinet	92 Persen
		Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap dokumen hasil-hasil sidang kabinet	92 Persen
		Persentase Arahan Presiden (APRES) pada sidang kabinet yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden yang disampaikan kepada Pejabat Eselon I di Sekretariat Kabinet sesuai ketentuan	100 Persen
		Persentase hasil sidang yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden yang sesuai ketentuan	100 Persen
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang disampaikan secara tepat waktu	92 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	70 Persen
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang disampaikan secara tepat waktu	92 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	B (5-8 kali revisi)
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan dan pelaporan sidang kabinet/ratas/ pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	
1. Layanan pelaporan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya	Rp2.100.000.000,-
Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	
Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan	
1. penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Rp120.887.000,-
2. Penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Rp15.000.000,-
3. Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Rp64.113.000,-
Total Anggaran	Rp2.300.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet



Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pelaporan
Persidangan



Heru Priyantono, S.H., M.H.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Said Muhidin, S.H., M.H

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Hubungan
Kemasyarakatan dan Protokol

Said Muhidin, S.H., M.H

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KEMASYARAKATAN DAN PROTOKOL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kehumasan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Kehumasan.	92
		Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP).	80
2	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Informasi yang Tepat Waktu, Tersedia, dan Update	Persentase Layanan Informasi Kegiatan Kabinet dan Setkab yang Tepat Waktu, Tersedia, dan Update.	100 persen
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Keprotokolan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Keprotokolan.	92
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Asdep Humas dan Protokol	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Internal Asdep Humas dan Protokol.	92
5	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Humas dan Protokol yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Humas dan Protokol	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Humas dan Protokol	90 Persen

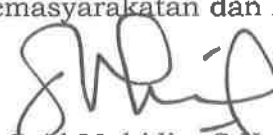
Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik serta Keprotokolan	
1. Layanan Hubungan Masyarakat	Rp1.904.322.000,-
2. Layanan Protokoler	Rp895.678.000,-
Total Anggaran	Rp2.800.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet



Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Kemasyarakatan dan Protokol



Said Muhidin, S.P., M.H



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuyu Mulyani, S.I.P., M.A.

Jabatan : Asisten Deputy Bidang Naskah dan Penerjemahan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jabatan : Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Naskah dan
Penerjemahan

Yuyu Mulyani S.I.P., M.A.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH DAN PENERJEMAHAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Naskah Kepresidenan yang Berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan yang Disampaikan secara Tepat Waktu	100 Persen
		Persentase Naskah Kepresidenan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase Naskah Kepresidenan yang Disusun Sesuai Ketentuan	100 Persen
2	Terwujudnya Dokumen Terjemahan yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Dokumen Terjemahan yang Dipublikasikan di Web Resmi Sekretariat Kabinet	100 Persen
		Persentase Pelayanan Penerjemahan yang Sesuai Ketentuan	100 Persen
3	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan yang Efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	B (5-8 kali revisi)
		Persentase Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyiapan Naskah Kepresidenan dan Penerjemahan

1. Naskah kepresidenan

Rp666.000.000,-

2. Dokumen terjemahan

Rp334.000.000,-

Total Anggaran

Rp1.000.000.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Naskah dan
Penerjemahan



Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.



Yuyu Mulyani, S.I.P., M.A.

KEDEPUTIAN BIDANG ADMINISTRASI



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Deputy Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

No.	SasaranProgram/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan K/L (instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	94 Persen
		Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara akurat	98 Persen
2	Terwujudnya layanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah yang berkualitas	Persentase rekomendasi penilaian pejabat Fungsional Penerjemah yang diselesaikan secara akurat	100 Persen
		Tingkat kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penerjemah	90 Persen
3	Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet	Persentase kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet	82 Persen
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet	WTP
		Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet	A (82,18)
		Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabinet	BB (74.50)
		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet	86

		Nilai hasil monev keterbukaan informasi publik	Informatif (90,87)
		Indeks Kematangan SPBE	Baik (2.85)
		Indeks Sistem Merit	Baik (297)
		Tingkat Maturitas SPIP	Terdefinisi (3,17)
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90 Persen
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Administrasi	Hasil Penilaian SAKIP Deputy Bidang Administrasi	A (80,12)
		Nilai Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Administrasi setelah hasil reuiu Inspektorat	35.10
		Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Administrasi	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan	
1. Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir	Rp. 1.851.201.000,-
2. Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan	Rp. 1.500.000.000,-
3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Rp. 201.277.965.000,-
4. Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan	Rp. 1.100.000.000,-
5. Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Pelayanan Umum	Rp. 67.236.596.000,-
Total Anggaran	Rp. 272.965.762.000,-

* Anggaran terkait pelaksanaan kegiatan Eselon II Mandiri yang dikoordinasikan Deputy Bidang Administrasi diperjanjikan di dalam PK Eselon II Mandiri

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Djaka Warsijanto, S.Sos., M.Ak.
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi



Farid Utomo, S.H., M.H.

• Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan



Djaka Warsijanto, S.Sos., M.Ak.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran	Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan perencanaan program dan anggaran Sekretariat Kabinet	78 Persen
2	Meningkatnya kualitas manajemen keuangan	Persentase kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 Persen
		Persentase penyelesaian penerbitan Surat Perintah Pembayaran yang diselesaikan secara akurat	96 Persen
3	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	80 Persen
		Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan revisi anggaran	80 Persen
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan	
1. Penyusunan Rencana Kerja Setkab	Rp145.863.000,-
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Kabinet	Rp354.137.000,-
3. Pelaksanaan revisi anggaran	Rp233.184.000,-
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Rp266.816.000,-
5. Penyusunan laporan keuangan	Rp223.567.000,-
6. Pengelolaan perbendaharaan	Rp276.433.000,-
Total Anggaran	Rp1.500.000.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi



Farid Utomo, S.H., M.H.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan



Djaka Warsijanto, S.Sos., M.Ak.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Henny Navilah, S.H., LL.M.

Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.

Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi



Farid Utomo, S.H., M.H.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana



Henny Navilah, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu	80 Persen
2	Meningkatnya kualitas layanan manajemen sumber daya manusia	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	75 Persen
		Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	80 Persen
		Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	80 Persen
		Indeks Sistem Merit	Baik (297)
3	Meningkatnya efektivitas layanan manajemen organisasi dan tata laksana	Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan	80 Persen
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80 Persen
		Persentase produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu	80 Persen
		Persentase kepuasan terhadap layanan bantuan hukum	70 Persen
4	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	C (9-12 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Rekrutmen dan pengangkatan pegawai | Rp326.900.000,- |
| 2. Administrasi kepegawaian | Rp134.484.000,- |
| 3. Pembinaan kepegawaian | Rp387.514.000,- |
| 4. Pemantauan dan penilaian kinerja pegawai | Rp37.200.000,- |

5. Penempatan/mutasi pegawai	Rp107.166.000,-
6. Pemberhentian pegawai	Rp57.332.000,-
7. Penyusunan laporan kepegawaian	Rp1.400.000,-
8. Pengembangan kepegawaian	Rp3.372.735.000,-
9. Gaji dan Tunjangan	Rp196.416.994.000,-
10. Koordinasi penyusunan produk hukum	Rp18.600.000,-
11. Penyusunan laporan	Rp9.500.000,-
12. Pengelolaan kelembagaan dan tata laksana	Rp346.422.000,-
13. Koordinasi kelembagaan dan tata laksana	Rp42.018.000,-
14. Pelaksanaan bantuan hukum	Rp19.700.000,-

Penyusunan rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Penyiapan Sidang Tim Penilai Akhir | Rp300.028.000,- |
| 2. Pelaksanaan Sidang Tim Penilai Akhir | Rp1.291.173.000,- |

Penyusunan Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan

- | | |
|--|-----------------|
| 3. Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir | Rp260.000.000,- |
|--|-----------------|

Total Anggaran

Rp203.129.166.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi



Farid Utomo, S.H., M.H.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana



Henny Navilah, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendry Prihandono, S.Kom., M.Kom.

Jabatan : Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.

Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

Hendry Prihandono, S.Kom., M.Kom.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIRO AKUNTABILITAS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Jumlah unit ke deputian yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori A	5 Unit kerja
		Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja	81 Persen
		Jumlah komponen penilaian reformasi birokrasi yang nilainya meningkat	6 Komponen
		Persentase tingkat pemanfaatan dokumen reformasi birokrasi	81 Persen
2	Terselenggaranya layanan persuratan serta ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan	81 Persen
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan SAKIP dan RB Kedeputian Bidang Administrasi	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Administrasi	80 Persen
		Persentase pemenuhan data dukung LKE PMPRB Deputi Bidang Administrasi	80 Persen
4	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan	
1. Perencanaan kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp229.481.000,-
2. Pemantauan, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi dan individu	Rp65.672.000,-
3. Pengembangan sistem manajemen kinerja	Rp71.929.000,-
4. Perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp149.650.000,-
5. Pelaksanaan manajemen perubahan di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp148.450.000,-
6. Pengkajian dan pengembangan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp68.818.000,-
7. Dukungan pelayanan dan administrasi ketatausahaan dan persuratan	Rp366.000.000,-
Total Anggaran	Rp1.100.000.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi



Farid Utomo, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi



Hendry Prihandono, S.Kom., M.Kom.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Suparti, M.AP.
Jabatan : Kepala Biro Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Administrasi



Farid Utomo, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Biro Umum



Dra. Suparti, M.AP.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIRO UMUM

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengadaan, Barang Milik Negara, Pemeliharaan, Perlengkapan dan Jamuan, serta Pelayanan Umum Lainnya di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan rencana pengadaan	95 Persen
		Persentase akurasi laporan Barang Milik Negara	100 Persen
		Persentase kepuasan terhadap layanan pengadaan, pengelolaan barang milik negara, pemeliharaan, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet	90 Persen
		Indeks Pengelolaan Aset	3.24 Persen
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	64 Persen
2	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro Umum	C (9-12 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Biro Umum	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Pelayanan Umum

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp65.939.359.000,-
2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp1.297.237.000,-
Total Anggaran	Rp67.236.596.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Pihak Pertama,
Kepala Biro Umum


Farid Utomo, S.H., M.H.


Dra. Suparti, M.AP.

STAF AHLI



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.
Jabatan : Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Komunikasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Komunikasi

Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
STAF AHLI BIDANG KOMUNIKASI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya dukungan manajemen pimpinan oleh Staf Ahli Sekretariat Kabinet	Persentase rekomendasi Staf Ahli Bidang Komunikasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Staf Ahli Bidang Komunikasi yang Efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Staf Ahli Bidang Komunikasi yang Efektif	B (5-8 kali Revisi)
		Persentase Penyerapan Anggaran pada Staf Ahli Bidang Komunikasi	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketausahaan

1. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan terkait isu strategis di bidang Komunikasi

Rp200.000.000,-

Total Anggaran

Rp200.000.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Komunikasi

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.

Jabatan : Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan
Internasional

Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
STAF AHLI BIDANG KEMARITIMAN, INVESTASI, DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya dukungan manajemen pimpinan oleh Staf Ahli Sekretariat Kabinet	Persentase rekomendasi Staf Ahli bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional yang Efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional yang Efektif	B (5-8 kali Revisi)
		Persentase Penyerapan Anggaran pada Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan

- Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan
1. terkait isu strategis di bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional

Rp200.000.000,-

Total Anggaran

Rp200.000.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Pertama,

Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan
Internasional

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mailani Amperawan, S.E., M.Si.

Jabatan : Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Mailani Amperawan, S.E., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya dukungan manajemen pimpinan oleh Staf Ahli Sekretariat Kabinet	Persentase rekomendasi Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesra yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang Efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang Efektif	B (5-8 kali revisi)
		Persentase Penyerapan Anggaran pada Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan

- Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan
1. terkait isu strategis di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat

Rp200.000.000,-

Total Anggaran

Rp200.000.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
 Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
 Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
 Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Mailani Amperawan, S.E., M.Si.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.
Jabatan : Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Politik dan Hukum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Politik
dan Hukum

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
STAF AHLI BIDANG POLITIK DAN HUKUM

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya dukungan manajemen pimpinan oleh Staf Ahli Sekretariat Kabinet	Persentase rekomendasi Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum yang Efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum yang Efektif	B (5-8 kali Revisi)
		Persentase Penyerapan Anggaran pada Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan

1. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan terkait isu strategis di bidang Politik dan Hukum

Rp200.000.000,-

Total Anggaran

Rp200.000.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Politik dan Hukum

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.

Jabatan : Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Reformasi Birokrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Reformasi Birokrasi

Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
STAF AHLI BIDANG REFORMASI BIROKRASI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya dukungan manajemen pimpinan oleh Staf Ahli Sekretariat Kabinet	Persentase rekomendasi Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi yang Efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi yang Efektif	B (5-8 kali Revisi)
		Persentase Penyerapan Anggaran pada Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan

1. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan terkait isu strategis di bidang Reformasi Birokrasi

Rp200.000.000,-

Total Anggaran

Rp200.000.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Reformasi Birokrasi

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.

INSPEKTORAT



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.

Jabatan : Inspektur Inspektorat

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Pertama,
Inspektur Inspektorat

Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet yang optimal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	80 Persen
		Jumlah unit ke deputian yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	5 unit
		Penyampaian Laporan Hasil PMPRB Sekretariat Kabinet secara tepat waktu	1 Laporan
		Indeks Kapabilitas APIP	Level 3
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80 Persen
		Deviasi antara nilai PMPRB hasil tim penilai internal (TPI) dengan hasil evaluasi KemenPANRB	<=5
		Persentase program dan kegiatan RB bidang penguatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai rencana	90 Persen
		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Inspektorat	70 Persen
2	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat yang efektif	Persentase pemenuhan dokumen/laporan terkait dukungan teknis dan administrasi Inspektorat yang disampaikan tepat waktu	80 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran Inspektorat	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Inspektorat	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
1. Pelaksanaan ketatausahaan dan dukungan administrasi serta teknis kegiatan pengawasan	Rp6.424.000,-
2. Pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran Inspektorat	Rp2.800.000,-
3. Pengoordinasian penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Inspektorat	Rp2.800.000,-
4. Audit	Rp324.358.000,-
5. Reviu	Rp9.450.000,-
6. Evaluasi	Rp246.400.000,-
7. Pemantauan	Rp82.383.000,-
8. Asistensi, fasilitasi, dan pelatihan	Rp15.760.000,-
9. Kegiatan pengawasan lainnya	Rp9.625.000,-
Total Anggaran	Rp700.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Pertama,
Inspektur Inspektorat

Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulyati Kristina, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

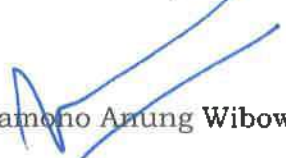
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Dr. Ir.  Pramono Anung Wibowo, M.M.

 Yulyati Kristina, S.Sos., M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi publik dan e-governance	Nilai hasil monev keterbukaan informasi publik	90.87 Informatif
		Indeks SPBE	2.85
2	Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi	Persentase kepuasan terhadap layanan teknologi informasi	78 persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip dan perpustakaan	Indeks Arsip	61.53 Baik
		Persentase kepuasan pengguna layanan Perpustakaan Khusus Sekretariat Kabinet	80 persen
4	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Pusat Data dan Teknologi Informasi yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi	B
		Persentase Penyerapan Anggaran pada Pusat Data dan Teknologi Informasi	90 persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Data, Teknologi Informasi, Kearsipan, dan Perpustakaan

1. Pengelolaan dokumen/arsip	Rp365.850.000,-
2. Pelaksanaan ketatausahaan Pusdatin	Rp269.283.000,-
3. Manajemen sistem informasi	Rp7.203.576.000,-
4. Pengelolaan bahan pustaka	Rp166.460.000,-
Total Anggaran	Rp8.005.169.000,-

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Yulyati Kristina, S.Sos., M.Si.

PUSAT PEMBINAAN PENERJEMAH



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Wahyu Utami, S.IP., M.E.
Jabatan : Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

**Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet**

**Pihak Pertama,
Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah**

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Sri Wahyu Utami, S.IP., M.E.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT PEMBINAAN PENERJEMAH

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah	Persentase tingkat kepuasan layanan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional penerjemah	90 Persen
2	Terwujudnya rekomendasi pembinaan pejabat fungsional penerjemah yang berkualitas	Persentase rekomendasi terkait penilaian, akreditasi, penetapan angka kredit, pengangkatan, kenaikan pangkat/jabatan, dan pengangkatan kembali, serta pemberhentian dari jabatan yang diselesaikan secara tepat waktu	100 persen
		Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan pelayanan Jabatan Fungsional Penerjemah yang ditindaklanjuti	100 Persen
3	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan penerjemahan yang berkualitas	Persentase kelulusan pejabat fungsional penerjemah pada pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	100 Persen
		Tingkat Kepuasan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penerjemah	90 Persen
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Pusat Pembinaan Penerjemah	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang disampaikan secara tepat waktu	100 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Pusat Pembinaan Penerjemah	75 Persen
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran yang disampaikan secara tepat waktu	100 Persen
		Persentase kepuasan pengguna terhadap sistem e-JFP dan Media Sosial	75 Persen
5	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Pusat Pembinaan Penerjemah yang Efektif	Indeks revisi program dan anggaran Pusat Pembinaan Penerjemah	C (10 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Pusat Pembinaan Penerjemah	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	
1. Perencanaan dan pengembangan program pembinaan JFP	Rp388.011.000,-
2. Penilaian kinerja dan uji kompetensi JFP	Rp496.424.000,-
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan JFP	Rp94.517.000,-
4. Penyusunan kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penerjemah	Rp63.200.000,-
5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penerjemah	Rp857.848.000,-
Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	
Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan	
1. penatausahaan, teknis, dan administrasi Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp85.164.000,-
2. Pengelolaan sistem informasi jabatan fungsional penerjemah	Rp84.172.000,-
3. Penyusunan dokumen program dan anggaran Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp15.554.000,-
4. Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp15.110.000,-
Total Anggaran	Rp2.100.000.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah

Sri Wahyu Utami, S.IP., M.E.